

Cascading Kinerja

Tahun 2017

(Versi Revisi sesuai APBD-P 2017)



**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KAB.TANJUNG JABUNG BARAT - PROV.JAMBI**

Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Maschun Sofyan, SH Kuala Tungkal 36512
Phone/Fax : (0742) 7351051 Email : disbunnaktanjabbarat@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan ke Hadapan Tuhan Yang Maha Esa yg telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga **Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** dapat menyusun **Revisi Cascading Tahun 2017**, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yg bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang **LAKIP** (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Secara Substanstif **Revisi Cascading Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** Tahun 2018 merupakan Sarana **Perjanjian Kinerja** (PK) dalam rangka mengimplementasikan **SAKIP** (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yg telah disesuaikan dengan **RPJMD Perubahan dan APBD-P 2017**.

Akhir kata Cascading ini diharapkan akan mampu menggambarkan pelaksanaan kegiatan guna mengantisipasi dan menjawab tantangan **Dinamika Pembangunan Perkebunan dan Peternakan** dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan **IPTEK** dan **Isu Global** yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Kuala Tungkal,

2017

**Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung jabung Barat**

Ir. Melam Bangun

Pembina Utama Muda

NIP. 19611215 199303 1 003

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | |
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 4 |
| 1.2 Gambaran Kondisi Organisasi | 5 |
| 1.3 Ruang Lingkup | 8 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| 2.1 Rencana Strategis | 9 |
| 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) | 10 |
| 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum | 11 |
| 2.5 Cascading Kinerja | 14 |
| BAB III PENUTUP | 17 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Good governance (kepemerintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “*good governance*” adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah: (1) **Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;** (2) **Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.**

1.2 GAMBARAN KONDISI ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menegaskan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas Peternakan;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- e. Membina **Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)**; dan

- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

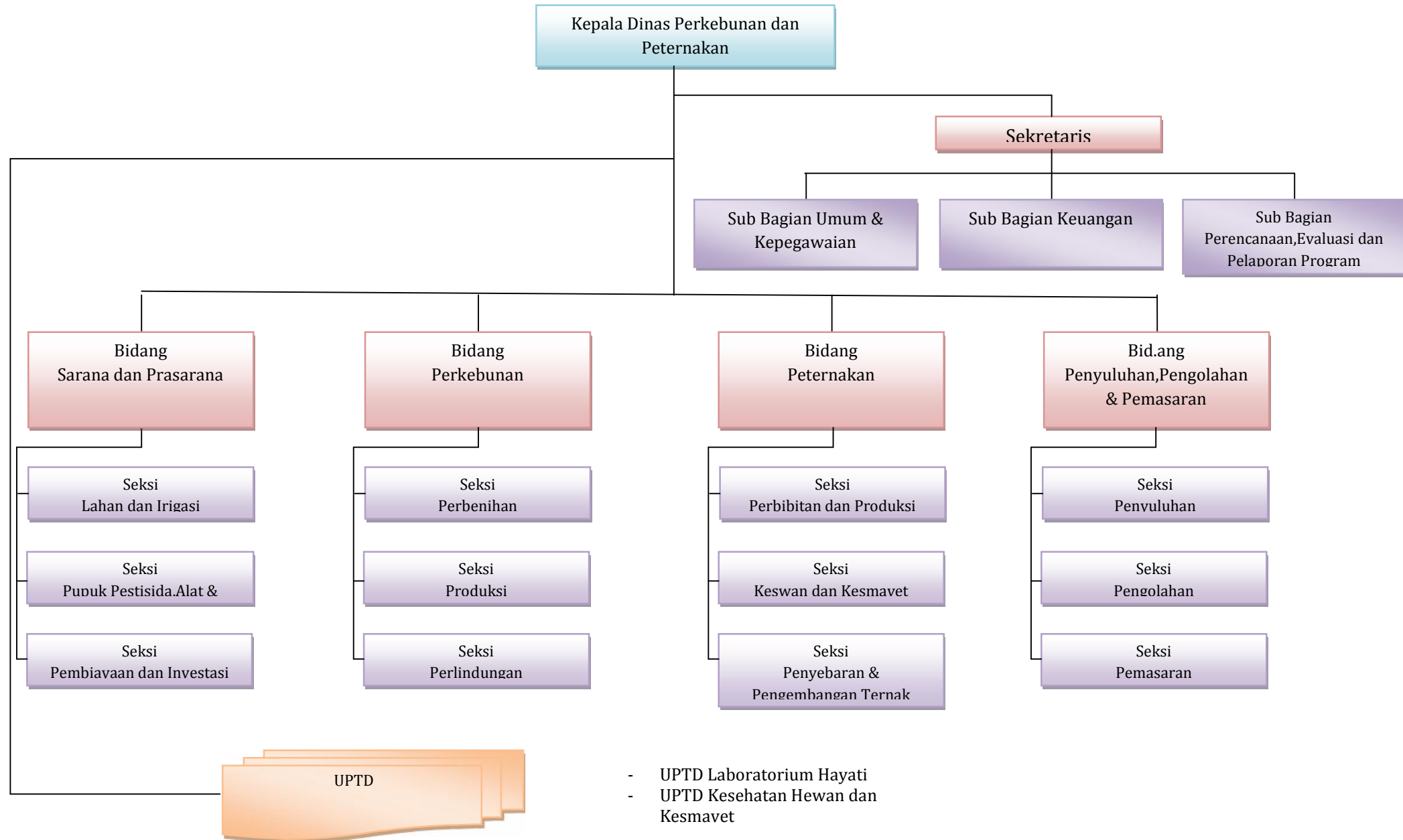
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas
2. 1 (satu) orang Sekretaris
3. 4 (empat) orang Kepala Bidang
4. 15 (lima belas) orang Kasi

Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Lahan dan Irigasi.
 2. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin.
 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
- d. Bidang Perkebunan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Perbenihan
 2. Seksi Produksi
 3. Seksi Perlindungan
- e. Bidang Peternakan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi.
 2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Penyuluhan.
 2. Seksi Pengolahan.
 3. Seksi Pemasaran.
- g. **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**, terdiri dari :
 1. UPTD Lab. Hayati
 2. UPTD Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu
 3. UPTD Kecamatan Bram Itam
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Revisi Cascading Tahun 2017 Dinas Perkebunan dan Peternakan



1.3 RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup Penyusunan **Revisi Cascading Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2017** adalah :

1. Dokumen Cascading Kinerja Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pejabat Eselon IV dilingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2017.
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan yg tercantum didalam **RPJMD Perubahan** serta Revisi **RENSTRA Dinas Perkebunan dan Peternakan** Tahun 2016-2021.

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Revisi Cascading Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2017 terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Kondisi Organisasi
- 1.3 Ruang Lingkup

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Umum
- 2.4 Cascading Kinerja

BAB III Penutup

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (2016-2021).

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2016 dan mengalami revisi sesuai dengan substansinya yg merupakan turunan dari Revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021 tersebut, adalah sebagai berikut:

2.2 TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih ditetapkanlah **Tujuan Strategis (TS) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** sebagai berikut :

Tujuan Strategis (TS) Dinas Perkebunan dan Peternakan.

| Kode | Tujuan Strategis (TS) |
|------|--|
| T.1 | <i>Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan serta Peningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan (T.1).</i> |
| T.2 | <i>Meningkatkan Produksi Daging Ternak dan Populasi Ternak (T.2)</i> |

Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis (TS)** Pembangunan Perkebunan dan Peternakan diperlukan beberapa **Sasaran Strategis (SS)** yg menggambarkan kondisi yg dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)** sebagai **IKU (Indikator Kinerja Utama)** untuk mengukur apakah **Sasaran Strategis (SS)** dapat mengkonfirmasi **Tujuan Strategis (TS)** yg akan dicapai pada masa mendatang (Tahun 2021).

Sasaran Strategis (SS) untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan Strategis 1 (T.1), “Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan serta Peningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan (T.1)”**, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

Tujuan Strategis 1 (T.1)

| Kode | Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) |
|------|--|---|
| SS.1 | Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan. | Produksi Komoditi Perkebunan (ton) : (Sawit, Karet, Kelapa, Kopi dan Pinang) |
| SS.2 | Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif | Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) : (Sawit, Karet, Kelapa, Kopi dan Pinang) |

2. **Tujuan Strategis 2 (T.2),” Meningkatkan Produksi Daging Ternak dan Populasi Ternak (T.2)”,** ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

Tujuan Strategis 2 (T.2)

| Kode | Sasaran Strategis (SS) | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) |
|------|--------------------------------------|---|
| SS.3 | Meningkatnya Produksi Daging Ternak. | Produksi Daging Ternak (kg) : (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Unggas) |
| SS.4 | Meningkatnya Populasi Ternak | Populasi Ternak (ekor) : (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Unggas) |

2.3 STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN UMUM

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

S t r a t e g i

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan melalui *Intensifikasi, Extensifikasi* dan *Diversifikasi*.
2. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktivitas ternak melalui *Gerakan Serentak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB)*, Pemetaan kawasan peternakan, integrasi ternak dengan tanaman, pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak, serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.
3. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani.
4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, dan vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan menular strategis.
5. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui *UPPO, Rumah Kompos, Biogas* dan lain lain.

6. Pengembangan *Sentra Agribisnis* di kawasan *Sentra Perkebunan dan Peternakan*.
7. Meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan.

K e b i j a k a n.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. *Kebijakan Umum* Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yang bermutu, pengendalian OPT, serta pengawasan peredaran Bibit, pupuk dan Pestisida.
2. Mewujudkan Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.
4. Peningkatan Pengelolaan sumberdaya Peternakan yang optimal dan berkelanjutan.

**Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 - 2021**

| VISI : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS ” | | | |
|---|--|---|--|
| MISI 3: “ Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan ”. | | | |
| Tujuan Strategis | Sasaran Strategis | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan serta Peningkatan Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan (T.1) | Meningkatnya produksi Komoditi Perkebunan (SS.1) | 1. Tingkatkan hasil produksi dan Produktifitas Hasil Perkebunan. 2. Meminimalisir serangan Hama Penyakit Tanaman. 3. Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh dan Pelaku Usaha Perkebunan 4. Meningkatkan pengelolaan lahan produktif dengan pengembangan tanaman penyegar tahunan | 1. Mewujudkan peningkatan hasil produksi melalui Intensifikasi, Diversifikasi, Ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yg bermutu. 2. Pengendalian OPT serta pengawasan peredaran Pupuk, Bibit dan Pestisida. 3. Penyebaran dan pemamfaatan tenaga penyuluh dalam pembinaan Kelompok Tani 4. Penyediaan bantuan bibit dan sarana produksi lainnya yg merupakan penunjang pengolahan perkebunan |
| | Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif (SS.2) | | |
| | | | |
| Meningkatkan Produksi Daging Ternak dan Populasi Ternak (T.2) | Meningkatnya produksi Daging (SS.3) | Peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak melalui Gerakan Serentak Birahi (Gertak Birahi) melalui Kawin Suntik (IB), pemetaan perwilayahan, Integrasi Ternak dengan Sawit, Pemanfaatan Bahan pakan Lokal dan pemberdayaan peternak serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta. | Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan guna mendukung peningkatan populasi dan produksi peternakan. |
| | Meningkatnya Populasi Ternak (SS.4) | | |

2.4 CASCADING KINERJA.

Cascading Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra. Perjanjian kinerja yang akan dicapai menggambarkan Perjanjian Kinerja Utama (IKU) untuk Pejabat Eselon II, Sasaran Program (Outcome) untuk Pejabat Eselon III serta Output sebagai Indikator Kinerja untuk Eselon IV. Adapun **Rincian Perjanjian Kinerja** atau **Revisi Cascading Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2017** dapat dilihat pada **Lampiran**.

REVISI CASCADING KINERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2017

| Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Tujuan 1 : “ Meningkatkan produksi Komoditi Perkebunanan serta Pengelolaan Lahan Produktif perkebunan” | | | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan 2 : “ Meningkatkan Produksi daging ternak dan Populasi ternak “ | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) : | | | | | | | 1. Meningkatnya Produksi Komodi Perkebunan 2. Meningkatnya Pengelolaan Lahan Produktif Perkebunan 3. Meningkatnya Produksi Daging Ternak 4. Meningkatnya Populasi Ternak | | | | | | | |
| Kepala Bidang Perkebunan | | | Kepala Bidang Peternakan | | | Kepala Bidang Sarana Prasarana | | | Kepala Bidang Penyuluh, pengelohan & Pemasaran | | | Sekretaris | | |
| Sasaran 1 : | | - Meningkatnya produksi 5 komoditi unggulan | Sasaran1 : | | - Meningkatnya Populasi dan Produksi hewan ternak | Sasaran1 : | | - Meningkatnya kelompok Petani yg menerapkan teknologi pertanian | Sasaran 1: | | - Terlaksananya promosi atas hasil komoditi perkebunan dan peternakan | Sasaran 1: | | - Meningkatnya kelengkapan dan kualitas pelayanan administrasi |
| Sasaran 2 : | | - Meningkatnya kepatuhan dan kerjasama kemitraan antara perusahaan dg asosiasi petani pada 5 komoditi unggulan | Sasaran 2 : | | - Menurunnya angka kematian ternak | Sasaran 2 : | | - Meningkatnya produksi 5 komoditi unggulan | Sasaran 2: | | - Tersedianya data peternakan dan perkebunan yg valid dan uptodate | Sasaran 2: | | - Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur |
| | | | | | | | | | | | | Sasaran 3: | | - Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur |
| | | | | | | | | | | | | Sasaran 4: | | - Tersedianya data perkebunan dan peternakan yg up to date |
| Kasi Produksi | Kasi Perbenihan | Kasi Perlindungan | Kasi Produksi & Pembibitan | Kasi Keswan & Kesmavet | Kasi Penyebaran & Pengembangan Ternak | Kasi Lahan & Irigasi | Kasi Pupuk, pestisida & alat | Kasi Pembiayaan & Investasi | Kasi Penyuluhan | Kasi Pengolahan | Kasi Pemasaran | Subbag Umum & Kepegawaian | Subbag Keuangan | Subbag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Program |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Terpeliharanya kebun percontohan kopi libtukom | - Terpeliharanya BPT Kelapa, pinang & Kopi | - Terlaksananya pencegahan dan pengendalian karhutla & konflik lahan | - Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB) | - Jumlah ternak yg terlayannya pengobatan, PKB,pemeriksaan specimen, | - Terlaksananya lomba ternak dan lomba petugas teknis peternakan dan AUTS ternak | - Luas lahan terairi TAM (Tata air Mikro) | - Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkebunan | - Diperolehnya STD-B untuk kebun sawit swadaya | - Terlaksananya koordinasi penyuluh perkebunan dan peternakan | - Terlaksananya dinamika kelompok P2WKSS, Pengadaan Bibit | - Terlaksananya publikasi dan promosi produk unggulan daerah | - Tersedianya kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran | - Tersusunnya Dokumen Keuangan SKPD | - Tersedianya data statistik Perkebunan dan Peternakan |

Revisi Cascading Tahun 2017 Dinas Perkebunan dan Peternakan

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--|---|--|---|----|---|
| - Terpeliharanya kebun percontohan kelapa sawit dan entres | - Terbinanya asosiasi dan terjalannya kerjasama kemitraan | - Terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan | - Terlaksananya sinkronisasi birahi - Terpeliharanya ternak itik indukan | vaksinasi dan eliminasi - Terlaksananya pengawasan lalu lintas ternak - Terlaksananya pengendalian pemotongan ternak betina produktif | - Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah - Tersedianya daging untuk konsumsi hari besar keagamaan | Terlaksananya Pelatihan TTG (Teknologi Tepat Guna) | dan peternakan - Terlaksananya pembinaan, pengawasan pupuk pestisida | | - Tersedianya bibit kelapa sawit bermutu - Terlaksananya penyebaran informasi pasar komoditi perkebunan | Unggul tanaman Perkebunan, pengadaan pupuk dan obat-obatan - Terlaksananya pelatihan SKE | daerah - Terlaksananya penyebarannya informasi pasar peternakan | - Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Jumlah PNS yg mengikuti Pelatihan | | - Tersedianya Bahan Perencanaan dan Pelaporan (RENJA, RKA, DPA, TAPKIN dan LAKIP) |



| UPT Lab.Hayati |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Teratasinya serangan OPT kebun rakyat - Revitalisasi Kebun Kopi Libtukom - Fasilitasi Peremajaan Kebun Sawit |

BAB III PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari **Revisi Cascading Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2017** dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Cascading Kinerja ini adalah untuk memberikan **gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah bagi Pejabat Eselon** yg ada dilingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan yg mengindikasikan *tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan* sesuai dengan Program dan Kebijakan yg ditetapkan.

Demikianlah Cascading Kinerja ini dibuat semoga bermamfaat, kritikan dan saran yg disampaikan akan diterima untuk kesempurnaan dimasa mendatang.

Kuala Tungkal,

2017

**Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung jabung Barat**

Ir. Melam Bangun

Pembina Utama Muda

NIP. 19611215 199303 1 003